



PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

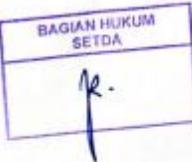
BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);





RKPD Kabupaten Balangan
Tahun 2023

No (1)	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (3)	Lokasi (4)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)
		Persentase sarana produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan		7 Desa (100%)		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	PERSENTASE KELUARGA YANG MELAKSANAKAN PRILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)		55%	335.680.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				2.004.997.530	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				1.321.245.900	APBD
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,06	371.292.000	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Cakupan Peserta KB Aktif		76,50	566.924.000	APBD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)		19,00	383.029.900	APBD
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman				192.450.088.169	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				183.612.822.169	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				183.612.822.169	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD		66 Angka	16.500.300.169	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap		28,31 %	9.963.584.000	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun		13,03 %		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak			4.981.792.000	APBD
		Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik			23.205.160.000	APBD